

BAB II

DINAMIKA HUBUNGAN RUSIA DAN AS PASCA PERANG DUNIA

II

Pasca perang Dunia II kondisi hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat belum menemukan titik damai. Keduanya justru diketahui terlibat dalam perang lokal di negara lain dan terkesan bersaing dalam konflik tersebut.

A. Sejarah Perang Dingin

Setelah berakhirnya Perang Dunia II muncul suatu konflik baru disebut *Cold War* atau Perang Dingin antara Rusia dan Amerika Serikat, dimana keduanya sama-sama melakukan hegemoni terhadap negara-negara lain agar mengikuti ideologi mereka. Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet merefleksikan kegagalan implementasi dari konferensi Yalta dan Postdam. Pada Perang Dingin, Rusia dan Amerika berusaha menyebarkan ideologi mereka atau bisa disebut *Proxy War*, Rusia menyebarkan paham komunisnya dan Amerika Serikat dengan ideologi liberalnya. Kedua negara ini sering disebut sebagai negara yang memunculkan adanya blok baru, Amerika memimpin blok barat sedangkan Rusia memimpin blok timur (Falah, 2015).

Situasi ini merupakan masa dimana kedua negara tersebut tidak terlibat perang secara langsung melainkan lebih mengarah ke pertarungan ideologis antara paham demokrasi-liberal dan komunis. Dalam pertarungan ideologis ini juga terlihat adanya intervensi ke negara-negara yang mengalami perang saudara, dalam bentuk pemberian bantuan senjata, pasukan, maupun

logistik. Amerika Serikat dan Uni Soviet dianggap sebagai dua negara super power yang jauh lebih kuat dari negara-negara lain di dunia. Kedua negara adidaya ini saling bersaing satu sama lain dan masing-masing berusaha memperluas pengaruhnya terhadap negara-negara di dunia. Pada Perang Dingin tidak satupun negara yang mempunyai pengaruh cukup besar seperti keduanya. Selanjutnya persaingan terlihat dari kekuatan militer dan persenjataan. Amerika Serikat mengutamakan pada kualitas persenjataan dan personil militernya, sedangkan Uni Soviet lebih menekankan dari segi kuantitas persenjataan yang dimiliki. Dari persaingan ini maka munculah ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang dilandasi adanya kecurigaan di antara kedua negara adidaya tersebut. Pengaruh dua negara adidaya itu melibatkan negara-negara kecil lainnya. Hal ini terjadi karena negara-negara kecil tersebut berkecenderungan mencari perlindungan keamanan ke negara-negara yang lebih kuat dan mampu melindungi serta punya pengaruh cukup besar. Kondisi itulah yang justru memicu terjadinya konflik-konflik regional di kalangan negara-negara yang sedang berkembang.

Kedua negara adidaya saling menahan diri untuk tidak terlibat secara langsung dalam berbagai konflik melainkan hanya diwakili oleh sekutu-sekutu mereka. Mereka mempersenjatai negara-negara sekutu untuk meyakinkan lawan bahwa mereka memiliki kemampuan militer yang lebih baik. Dalam hal ini perselisihan antara kedua belah pihak sangat terlihat. Perang Dingin adalah masalah serius bagi permasalahan di hubungan internasional. Adapun masalah

tersebut berupa perang ideologi yang menyebabkan kedaulatan suatu negara berkurang fungsinya. Salah satu konsekuensi dari Perang Dingin adalah terhambatnya sistem militer sebagai akibat langsung dari sikap hati-hati yang menganggap lawan mempunyai persenjataan nuklir lebih baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Perang tersebut sebenarnya dapat menimbulkan kehancuran pada kedua belah pihak dan mengorbankan jutaan penduduk dunia. Oleh karena itu, dengan adanya perimbangan kekuatan oleh AS dan Rusia serta adanya peran aktif dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sehingga Perang Dunia ketiga dapat dihindarkan. (Murtamadji, 2009).

Menyadari adanya perkembangan komunisme yang sangat cepat di wilayah Eropa pasca Perang Dunia II, Amerika Serikat memikirkan cara untuk mencegah hal tersebut agar komunisme tidak semakin meluas di wilayah Eropa. Salah satu caranya adalah pemulihan ekonomi Eropa atas ancaman ekspansi komunisme. Amerika Serikat melihat bahwa komunisme hanya dapat berkembang pesat apabila daerah tersebut sedang mengalami kemiskinan dan menurunnya perekonomian di daerah tersebut. Maka dari itu, untuk mencegahnya perkembangan komunisme di wilayah Eropa Amerika Serikat harus melakukan upaya untuk meningkatkan ekonomi rakyat Eropa yang terancam komunisme. Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat G Marshall menyanggupi rencana tersebut untuk diterapkan di negara-negara Eropa yang mengalami krisis ekonomi pasca PD II.

Pada awalnya rencana Marshall atau Marshall Plan tidak membedakan ideologi yang dianut oleh masing-masing negara Eropa. Namun, pada kenyataannya sebagian besar negara di Eropa mengalami krisis ekonomi. Setelah Marshall Plan mulai diterapkan di Eropa pada akhirnya hanya diikuti 16 negara non komunis di Eropa Barat. Namun, rencana ini dikritik oleh Uni Soviet karena dianggap terlalu imperialis. Walaupun hal ini mendapatkan kritikan dari pihak lawan, Marshall Plan dianggap sukses karena dalam kurun waktu 3 tahun (1948-1951) mampu meningkatkan perekonomian Eropa Barat bahkan mengungguli perekonomian sebelum perang. Keuntungan Marshall Plan tidak hanya dirasakan oleh negara-negara Eropa Barat, tetapi Amerika Serikat juga mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang terlihat jelas adalah Amerika Serikat akan menjadikan Eropa Barat sebagai partner dalam melawan Komunisme (Sukardi, 2011).

Ditanda tangannya Marshall Plan oleh Presiden Amerika Harry S Truman yang didasarkan pada kebijakan Amerika Serikat untuk mendukung masyarakat yang bebas bertujuan untuk melawan penaklukan yang dilakukan oleh kelompok minoritas bersenjata ataupun tekanan dari luar. Alasannya karena bagi Truman suatu rezim yang sifatnya totaliter justru memaksa orang untuk dapat bebas, sehingga banyak pakar yang menyatakan bahwa Marshall Plan dan Doktrin Truman merupakan awal ditandainya perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet (Prasojo, 2013). Doktrin Truman berasal dari pidato Presiden Harry Truman pada tanggal 12 Maret 1947. Saat itu Truman

melakukan pidato sebagai akibat dari keputusan Inggris untuk menghentikan pengiriman bantuan militer dan ekonominya kepada pemerintah Yunani dalam perang sipil melawan Partai Komunis Yunani. Truman meminta kepada anggota Kongres untuk menyetujui pemberian bantuan kepada Yunani untuk melawan Komunis dan juga mengusulkan untuk membantu Turki karena Inggris sudah tidak ingin bekerjasama terhadap negara tersebut (Perdana, 2012).

Menurut Uni Soviet Marshall Plan hanyalah sebuah strategi AS untuk memanfaatkan situasi Eropa terutama di Jerman untuk kepentingannya. Adanya pemberian bantuan ekonomi ke wilayah Jerman terutama di Jerman Barat, mengetahui hal tersebut Uni Soviet melakukan blokade penuh terhadap semua perjalanan darat dari Berlin barat ke wilayah Berlin yang sudah terbagi empat. Blokade itu bertujuan agar kawasan tengah dan timur tidak dikuasai oleh AS. Blokade darat diberlakukan Soviet antara Juni 1948 sampai Mei 1949. Namun, sejak saat itu AS dan sekutu-sekutunya mengirim pasokan logistik ke Berlin melalui pesawat udara. Dua tahun setelah blokade dicabut, Soviet akhirnya membangun rangkaian tembok pembatas di Berlin sehingga Jerman terpecah menjadi dua, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur, sebelum kembali bergabung pada 1990 (Kawilarang, 24-6-1948: Uni Soviet Blokade Berlin, 2014).

Untuk menahan ancaman dari Uni Soviet, AS bersama dengan negara-negara Barat secepat untuk membentuk Pakta Atlantik Utara (North Atlantic Pact) yang ditandatangani tanggal 24 Agustus 1949. Pada mulanya, NATO hanyalah merupakan perjanjian pertahanan antara Inggris dan Perancis (1947). Pada

tanggal 4 April Amerika Serikat dengan negara-negara Eropa membentuk NATO. Anggota NATO antara lain Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Belgia, Belanda, Luxemburg, Kanada, Portugal, Denmark, Norwegia, Italia, Islandia, Yunani, Turki dan Jerman Barat. Untuk kerjasama tersebut Kongres AS mengeluarkan Mutual Defensi Assistenci Act tahun 1949 berisi anggaran bantuan militer sebesar US \$ 1 milyar. Tanggal 27 Januari Presiden AS menyetujui rencana pembentukan pertahanan gabungan dengan NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) (Supriatna, 2014).

Sementara itu, pihak Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet juga membentuk pakta pertahanan. Setelah pembentukan NATO oleh blok barat, maka Uni Soviet membentuk pakta pertahanan dengan negara-negara lain yang berhaluan sosialis-komunis untuk mengimbangi hal tersebut. Pakta tersebut bernama Pakta Warsawa yang dibentuk di Warsawa, Polandia pada tanggal 14 Mei 1955. Anggota Pakta Warsawa antara lain Uni Soviet, Polandia, Cekoslovakia, Bulgaria, Hongaria, Rumania, Albania, Mongolia, dan Jerman Timur (Setyawan, 2015).

Perang Dingin menimbulkan pergeseran kondisi militer antara kedua negara superpower. Politik luar negeri Uni Soviet secara resmi tidak pernah menerima konsep AS tentang '*nuclear deterrence*'. Konsep ini disebut sebagai '*policy of blackmail*' sebab logika *deterrence* membawa pada perlombaan senjata nuklir yang tidak berujung (*unending spiral*), dan logika tersebut juga menghendaki masing-masing pihak menyiapkan kekuatan untuk menghadapi

kemungkinan perang nuklir. Namun semakin tingginya konflik militer AS-Uni Soviet serta adanya bahaya nuklir, maka diusulkansuatu perundingan mengenai militer yang dikemukakan oleh Lyndon Baines Johnson Presiden Amerika Serikat pada waktu itu bulan Januari 1967 disambut baik oleh pihak Uni Soviet. Perundingan SALT I (*Strategic Arms Limitation Talk*) dirundingkan di Helsinki (1969), kemudian Mei 1972 ditandatangani di Moskow oleh Presiden Brezhnev (Uni Soviet) dan Presiden Nixon (AS). Perjanjian ini mengatur dasar kesetaraan (paritas) dalam segi kualitatif maupun kuantitatif tentang ABM (*Anti Ballastic Missile*), serta dicapai persetujuan sementara (*interim agreement*) tentang pembatasan senjata ofensif ICBM (*Inter Continental Ballastic Missile*) dalam masa lima tahun. Pada akhir 1974 Breznev dan Ford mengadakan pertemuan di Vladivostok, menghasilkan *Aide-memoiere* berupa: Pembatasan senjata akan dibicarakan pada SALT II, termasuk pembatasan penyebaran tipe-tipe baru senjata strategis; serta melanjutkan verifikasi interim agreement.

SALT II (awal 1975-1979) merupakan negosiasi yang sangat panjang. Pembahasan tentang pembatasan persenjataan strategis misal MIRV banyak mengalami hambatan terutama pada masalah kualitatif, klasifikasi jenis senjata, operasionalisasinya, maupun pengawasannya. Dua macam senjata yang banyak menghambat perundingan tersebut adalah *Backfire*, senjata strategis Uni Soviet yang bisa menembak sasaran AS secara tepat, tetapi karena termasuk jenis kelas menengah maka Uni Soviet menghendaki agar tipe ini tidak dimasukkan dalam pembahasan, sebaliknya AS bersikap *Cruise Missile*, peluru kendali berkepala

nuklir miliknya tidak dimasukkan ke dalam pembicaraan. Karena perbedaan ini perbedaan militer mengalami *statusquo*.

Sebenarnya kedua pihak optimis untuk berunding masalah SALT III, namun Uni Soviet masih enggan mengurangi dan membatasi senjata strategisnya. Ketika Uni Soviet menuntut agar senjata AS berupa FBS (Forward Basic System) berkepal nuklir yang dapat ditembakkan dari Eropa ke Uni Soviet agar ditarik dari kawasan Eropa disetujui oleh pihak AS. Tetapi, Uni Soviet justru tidak menanggapi persetujuan AS tersebut. Akibat tidak adanya penyelesaian maka perlombaan senjata terus berlangsung dan biaya militer terus meningkat. Perlombaan senjata ini menjadikan Uni Soviet mengeluarkan anggaran militer yang sangat besar (Salamah, 2013, hal. 228-229).

Perang Dingin menyebabkan banyak dampak di seluruh dunia, salah satunya adalah menimbulkan berbagai perang di negara-negara lainnya. Walaupun tidak terlibat langsung dalam konflik, kedua belah pihak justru terlihat bersaing melalui koalisi militer, penyebaran dan pengaruh ideologi, memberikan bantuan kepada negara-negara sekutu, spionase, melakukan propaganda besar-besaran, senjata nuklir, bersaing dalam acara-acara olahraga internasional, dan kompetisi teknologi seperti Space Race. AS dan Uni Soviet juga bersaing dalam perang proxy yang berbeda. Uni Soviet membantu revolusi komunis di Amerika Latin dan Asia Tenggara yang sangat ditentang oleh beberapa negara Barat. Amerika Serikat melihat hal tersebut berusaha untuk mencegahnya dengan mengirimkan pasukan militer dan peralatan perang. Untuk meminimalisir risiko

perang nuklir yang nantinya dapat terjadi, maka kedua belah pihak sepakat untuk mendekati *détente* pada tahun 1970 yang bertujuan meredakan ketegangan politik yang terjadi (Dudung, 2015). Namun, konflik tidak berhenti sampai disitu, kondisi politik keduanya justru semakin terlihat tegang setelah keikutsertaan mereka dalam beberapa Perang lokal demi eksistensi ideologi mereka di Asia. Salah satunya adalah di Perang Korea dan Perang Vietnam.

1. Perang Korea

Semenanjung Korea merupakan wilayah yang terletak di kawasan Asia Timur Laut. Semenanjung Korea dalam berabad-abad sejarahnya merupakan wilayah yang sangat penting di kawasan tersebut sebagai daerah yang menghubungkan Asia Timur Laut dengan negara lain. Hal ini karena Semenanjung Korea terletak di antara tiga negara besar yaitu Jepang, Cina, dan Rusia. Terbaginya Korea menjadi dua Negara yang berdaulat merupakan salah satu dampak dari Perang Dunia II yang semakin memuncak di Perang Dingin hingga saat ini. Korea merupakan negara yang tidak terpisahkan dari konflik ideologi Liberal-Demokratis dari Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Komunis-Sosialis oleh Blok Timur pimpinan Uni Soviet. Kedua belah pihak saling berlomba-lomba memberikan pengaruhnya di wilayah Korea untuk kepentingan mereka (Widyasari, 2012).

Perang yang berlangsung pada tahun 1950 hingga 1953 ini merupakan perang besar di kawasan Asia yang merefleksikan perang ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Korea Utara didukung oleh Uni Soviet dan

China negara yang paling mendominasi, sedangkan Korea Selatan didukung oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Serangan Korea Utara pada tanggal 25 Juni 1950 ke daerah Selatan, mampu merebut ibukota Seoul dengan bantuan Tank dan persenjataan militer lainnya dari Uni Soviet (Pramono, Perang Korea: 3 Hari Perang Seoul sudah Jatuh Ketangan Korut, 2015). Untuk melawan serangan tersebut, Korea Selatan dibantu dengan Amerika Serikat dan PBB yang kemudian mampu melewati perbatasan dan akhirnya dapat merebut Pyongyang dan wilayah lainnya. Adanya aksi balasan tersebut menjadikan Perang Korea menjadi lebih memanas bahkan hampir menuju pada Perang Nuklir. Namun, Korea Utara belum mampu menandingi kekuatan Korea Selatan dalam persenjataan. Meskipun didukung oleh 135.000 tentara, Kelemahan militer yang sangat terlihat pada Korea Utara adalah ketidakmampuan untuk mengangkut perlengkapan yang sangat dibutuhkan untuk mengikuti perkembangan invasi ke selatan. Kemudian pada 10 Juli 1951 terjadi perundingan gencatan, namun setelah 2 tahun perundingan gencatan senjata tersebut agresi benar-benar terlaksana (Kohlmann, 2013).

2. Perang Vietnam

Perang Vietnam terjadi pada tahun 1954-1975 yang merupakan sebuah Perang yang memperjuangkan kemerdekaan Vietnam. Komunis mempunyai peran penting dalam Perang ini terutama dalam bidang politik yang mendominasi situasi dalam negeri Vietnam. Oleh sebab itu, Amerika Serikat mulai terancam dengan adanya komunis di Vietnam karena komunisme disini

adalah proses penyebaran ideologi terutama di kawasan Asia Tenggara yang dianggap akan menggeser posisi Amerika Serikat sebagai Superpower. Akibat dari ketegangan ideologi ini Vietnam terbagi menjadi dua yakni Vietnam Utara yang menganut paham Komunis dan dipimpin Rusia dan China, lalu Vietnam Selatan didukung oleh negara-negara barat terutama Amerika Serikat dan Perancis yang menganut paham Liberalisme (N.P, 2009).

Setelah Perang Dunia II, ketika negara-negara Asia Tenggara memperoleh kemerdekaannya termasuk Vietnam pada tahun 1945. Perancis akhirnya kembali datang setelah pasukan Inggris dan Cina bersikeras mempertahankan status quo di wilayah tersebut. Akhirnya di Vietnam membentuk gerakan perlawanan bernama Vietminh bentukan Ho Chi Minh dan sahabatnya Vo Nguyen Giap yang bertujuan untuk melawan usaha penjajahan Perancis, kemudian Selama tahun 1945-1954 pasukan Vietminh berjuang melawan pasukan Perancis.

Melihat kekalahan barat di Perang Korea, Amerika Serikat mulai khawatir akan berkembangnya komunis di Asia Tenggara dan memutuskan untuk memberikan bantuan militer berupa membantu persenjataan kepada pasukan kolonial Perancis dan Thailand, yang kemudian bekerjasama membentuk pakta pertahanan dengan Amerika Serikat memutuskan mengirim pasukan untuk membantu Perancis terutama ketika perang Dien Bien Phu. Selain mengirim bantuan dalam bentuk pesawat, amunisi dan lainnya, Amerika Serikat juga mengirim pasokan suplai makanan saat Perancis terjebak di Dien Bien Phu. Pada tahun 1954 Perang Dien Bien Phu berakhir dengan kemenangan pihak Vietminh. Pasca Konvensi Geneva tahun 1955, Vietnam resmi merdeka dan terpisah menjadi

dua negara. Vietminh yang menduduki wilayah Vietnam bagian utara mendirikan negara Republik Demokrasi Rakyat Vietnam atau dikenal sebagai Vietnam Utara. Sedangkan wilayah tersisa yang dikuasai Perancis menjadi Kerajaan Laos, Kerajaan Kamboja dan Kerajaan Vietnam yang menjadi Republik Vietnam atau Vietnam Selatan.

Uni soviet mempunyai peran yang cukup besar dalam pembentukan dua negara komunisme baru: Korea Utara dan Vietnam Utara dalam Konvensi Geneva tahun 1955, Korea Utara dan Selatan dipisahkan seperti Vietnam Selatan dan Utara. Kemunculan dua negara komunis di wilayah Asia Pasifik ini menjadi ancaman Amerika Serikat karena dikhawatirkan wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara juga akan masuk kedalam paham komunis. Melihat usaha yang dilakukan oleh Vietnam Utara, Amerika Serikat merasa perlu ikut serta dalam peta politik di Vietnam dan Asia Tenggara. Hal ini dilakukan karena rasa khawatir Amerika apabila Vietnam Utara berhasil merebut Saigon maka negara-negara Asia Tenggara lainnya dipastikan jatuh yang berarti semakin menyebarnya komunis di Asia Tenggara (Octaviano, 2014).

B. Dampak Perang Dingin

Berakhirnya Perang Dunia II ternyata membawa dampak yang cukup besar bagi dunia terutama Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dampak yang timbul tidak hanya muncul pada satu bidang saja, namun berdampak di hampir segala bidang termasuk pada bidang Ekonomi, politik dan sosial. Pasca PD II kondisi perekonomian dunia mengalami ketidakstabilan. Selama Perang Dunia II setidaknya banyak eksploitasi terutama padatanegara kerja, modal, dan biaya

perang sehingga ketika perang berakhir keadaan perekonomian sangat menurun. munculnya dua kekuatan besar pasca Perang Dunia telah menyebabkan sistem ekonomi dunia terbagi menjadi dua yakni sistem kapitalis dan sistem sosialis. Sistem ekonomi kapitalis dipimpin oleh Amerika Serikat sedangkan Sistem ekonomi sosialis dipimpin oleh Uni Soviet. Adanya dua kekuatan besar dunia tersebut, ternyata memunculkan persaingan diantara keduanya. Amerika Serikat mulai khawatir dengan hadirnya Uni Soviet yang akan mempengaruhi negara-negara yang kesulitan ekonomi terutama di wilayah Eropa. Maka dari itu, AS melalui Marshall Plan sebagai strategi untuk membendung pengaruh Uni Soviet. Kemudian pada bidang sosial mulai muncul lembaga-lembaga besar dunia yang bertujuan untuk perdamaian dunia, salah satunya adalah PBB (Djaja, 2012, hal. 201).

Dalam bidang politik juga membawa dampak yang cukup besar. Pasca Perang Dingin kondisi dunia merujuk pada negara superpower tunggal yaitu Amerika Serikat yang selanjutnya memunculkan tatanan baru dunia (New World Order). Kesuksesan AS disebabkan karena paham kapitalis yang dianutnya sehingga membuat AS secara perlahan dapat membangun perekonomian dan menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Hal ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa paham liberalis-kapitalis mampu membangkitkan perekonomian dunia yang kemudian melahirkan institusi-institusi perekonomian internasional. Sedangkan munculnya AS sebagai hegemon tunggal yang memiliki perekonomian baik dan cenderung stabil serta militer yang kuat dapat

diidentifikasi sebagai meningkatnya supermisi. Akan tetapi, munculnya negara-negara baru yang mendominasi pasar dunia seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, bahkan bangkitnya Jerman dan Perancis menandai munculnya aktor baru dalam geopolitik. Timbulnya kekuatan-kekuatan baru tersebut adalah untuk mengubah kekuatan dunia sehingga sumber kekuatan dunia tidak hanya berasal dari satu kekuatan tunggal atau multipolar sebagai periode ketiga dalam *new world order*. Walaupun diketahui bahwa AS merupakan negara super power yang memiliki pengaruh cukup besar di dunia, tetapi bangkitnya perekonomian negara-negara seperti Tiongkok, Jerman, Jepang dan negara-negara lainnya telah mampu memberikan pengaruhnya pada negara lain. Maka dari itu negara-negara tersebut kemudian dinamakan sebagai *shadow hegemon* yaitu negara-negara yang secara tidak langsung menjadi hegemon tanpa harus menyatakan secara langsung seperti AS dan Uni Soviet pada era Perang Dingin (Mastuti, 2016).

C. Konflik AS dan Rusia Pada Era Modern

Berakhirnya Perang Dingin ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet dan lahirlah Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara yang sangat berpengaruh di Dunia. Sekali lagi Amerika Serikat membuktikan bahwa pertahanannya mampu membawanya pada kemenangan sehingga sesuatu yang wajar jika Amerika Serikat saat ini menjadi negara yang sangat berwibawa dimata Dunia Internasional.

Pasca Perang Dingin adalah sebuah era kemenangan kapitalisme. Runtuhnya Uni Soviet serta paham komunis yang diusungnya secara otomatis

membuat negara-negara pecahan Uni Soviet pun menerima sistem perdagangan pasar bebas yang dianut oleh Amerika Serikat. Rusia, sebagai negara yang menggantikan Uni Soviet pun turut menerima bantuan dari IMF untuk mengatasi krisis ekonomi di negaranya yang terjadi menjelang keruntuhan Uni Soviet. Pada masa ini pula, kekuatan dunia pun berubah menjadi *unipolar*, Amerika Serikat menjadi negara adidaya tunggal menyusul keruntuhan Uni Soviet. (Anwar, 2014).Paska berakhirnya perang dingin tersebut, dunia internasional mulai mendapatkan berbagai isu-isu internasional seperti terorisme, globalisasi, teknologi, etnis, ekonomi dari isu sebelumnya yang hanya membahas mengenai isu tentang militer saja. Hal ini tentu saja mengubah dunia untuk ke era yang lebih baru. Namun, Rusia yang memiliki kekuatan militer, ekonomi dan politik yang kuat juga terlihat berselisih paham dalam menanggapi berbagai permasalahan dunia dengan Amerika Serikat hingga sekarang. Salah satunya contohnya adalah konflik Crimea yang belum lama ini terjadi di wilayah Ukraina.

Semenanjung Crimea adalah wilayah Rusia yang menjadi pangkalan armada Laut Hitam sejak abad ke-18. Pemimpin Uni Soviet pada waktu itu Presiden Nikita Khrushchev memberikan Crimea kepada Ukraina pada tahun 1954. Krisis Crimea bermula dari terjadinya Revolusi Ukraina pada awal tahun 2014 yang berpusat di semenanjung Krimea-Ukraina, dimana mayoritas penduduknya adalah dari etnis Rusia yang menggunakan bahasa Rusia sebagai bahasa keseharian. Pemerintah nasional pro-Rusia di Ukraina berhasil digulingkan Pada

bulan Februari 2014 dan diganti dengan sistem pemerintahan yang memiliki hubungan lebih dekat dengan Uni Eropa. Situasi ketegangan semakin meningkat di Ukraina antara kelompok pro-Eropa dan gerakan rakyat anti-maidan pro-Rusia. Hal ini dikarenakan pemberitaan Media Rusia tentang pemerintah baru Ukraina sebagai pemerintahan yang anti-Rusia. Semenjak keruntuhan Uni Sovyet, wilayah Crimea menjadi sebuah republik otonomi dibawah otoritas pemerintah Ukraina. Namun, Sejak bergulirnya referendum 17 Maret 2014 Crimea berada di bawah kendali Rusia, walaupun hal ini tidak diakui oleh Amerika dan sekutunya. Proses bergabungnya Crimea kedalam wilayah Rusia ini sendiri merupakan proses yang menarik untuk dicermati secara politik, ekonomi dan militer (Aji, 2014).

Seiring dengan berakhirnya Perang Dingin, perseteruan antara Amerika Serikat dan Rusia mulai melunak. Sampai pada mundurnya Presiden Viktor Yanukovich Rusia mulai memperlihatkan sikap melawan terhadap Amerika Serikat dan sekutunya (Indra, 2014). Presiden Yanukovich dilengserkan oleh parlemen Ukraina karena menolak perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa dan lebih memilih lebih dekat dengan pemerintah Rusia. Setelah adanya aksi protes yang bentrok dengan aparat keamanan Ukraina dan telah menewaskan banyak korban (Anonymous, 2014).

Setelah terjadinya referendum pada tahun 2014, Rusia memiliki hak untuk melakukan aneksasi terhadap Crimea. Walaupun rencana tersebut ditentang oleh Uni Eropa, Amerika Serikat dan beberapa negara yang tidak

setuju atas rencana tersebut. kegigihan Rusia yang melakukan aneksasi tersebut membuat Amerika Serikat merasa khawatir. Oleh karena itu, Amerika Serikat dan sekutunya memberikan sanksi ekonomi berupa sanksi dagang kepada Rusia atas tindakan aneksasi ke Crimea. Sanksi yang diberikan Amerika Serikat terkait dengan perebutan kekuasaan di Crimea ternyata tidak mempengaruhi invasi Rusia ke Crimea. Mengetahui sanksi tersebut, Rusia menghubungi China sebagai partner untuk melawan sanksi tersebut berupa kerjasama ekonomi dan teknologi. Rusia juga mengambil kebijakan untuk menaikkan harga gas bumi kepada negara-negara Eropa dan mengancam akan memblokir pasokan gas bumi ke wilayah Ukraina (Widiyanti, 2016).

Pasca dipecatnya Yanukovych, Rusia mengeluarkan berbagai ancaman baik finansial maupun didalam kerjasama untuk mempengaruhi Ukraina. Menghadapi tekanan dari Rusia, Ukraina mencoba untuk meminta bantuan kepada Amerika Serikat dan Uni Eropa. Permintaan bantuan finansial kepada barat merupakan salah satu pilihan Ukraina untuk melawan ancaman dari Rusia. Melalui IMF, Amerika Serikat memberikan bantuan kepada Ukraina agar terhindar dari ancaman hutang Rusia (Candrawati, 2014). Permintaan bantuan kepada pihak barat bukanlah hal yang asing bagi Ukraina karena mereka telah menjalin hubungan kerjasama sejak tahun 2005, hal ini ditandai dengan adanya peningkatan keinginan masyarakat agar Ukraina masuk kedalam anggota NATO. Permintaan bantuan tersebut ternyata didukung oleh pihak barat karena Ukraina dianggap dapat mengeluarkan Amerika dari krisis ekonomi yang sedang

berlangsung dan bisa menjadi partner kerjasama kawasan karena Ukraina memiliki sumber daya yang dapat diperhitungkan. Disisi lain, Rusia juga memiliki kepentingan di Ukraina yakni keinginan Rusia mempertahankan Ukraina karena adanya pembangunan kekuatan dengan merangkul negara-negara bekas Uni Soviet untuk menyaingi blok Eropa di kawasan Eropa Timur (Eurasia Union). Ukraina sebagai negara bekas Uni Soviet ternyata memiliki peran penting di Eropa Timur terutama sebagai *buffer zone* untuk Rusia.

Perubahan kekuatan di wilayah Eropa Timur sangat jelas terlihat ketika Ukraina menyatakan bergabung dengan Federasi Rusia. Rusia mulai menempatkan 40.000 pasukan militernya di kawasan Laut Hitam serta membangun 96 unit pangkalan militer. Pembangunan tersebut merupakan bentuk implementasi keberhasilan Rusia memiliki Ukraina. Meningkatnya kekuatan Rusia di Crimea, membuat NATO berkeinginan untuk menempatkan pasukannya di wilayah Baltik dan Polandia untuk mengimbangi Rusia. Keberadaan Rusia di Krimea dengan persenjataan lengkap menjadi ancaman terhadap negara anggota NATO di Baltik. Karena sistem senjata Rusia sejatinya telah menguasai ruang udara, laut dan darat daerah Baltik. Munculnya kelemahan NATO serta imbas dari konflik sektarian Timur Tengah membuat power Barat semakin melemah, sehingga respon terhadap konflik Ukraina tidak sekeras dengan konflik yang terjadi di negara lain (Edison, 2015).